



WANTIKNAS

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH, ANTARA TANTANGAN DAN CAPAIAN



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pada 20 Mei 2021 lalu bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, Presiden Jokowi meluncurkan kegiatan pengembangan literasi digital nasional. Program ini merupakan bagian dari 5 transformasi digital yang disampaikan Presiden pada awal Agustus 2020 lalu, selain konektivitas, proses pemerintahan yang efektif, pusat data, dan kebijakan terkait. Harus diakui Sumber Daya Manusia (SDM), memang menjadi salah satu kunci penting dari transformasi digital.

Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana agar kita bisa menyediakan kebutuhan talenta digital dan menyebarkannya ke seluruh daerah di Indonesia. Transformasi digital bukan hanya perhatian dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Beberapa daerah sudah mengawali langkah transformasi digital sejak beberapa tahun silam walau saat dicanangkan belum disebut sebagai transformasi digital. Salah satu yang banyak menarik perhatian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang sejak awal telah didampingi oleh Wantiknas. Salah satu keberhasilan Kabupaten Sumedang adalah mempersiapkan kebutuhan SDM digital melalui kolaborasi dengan stakeholder lainnya.

Kita memang tidak bisa mengabaikan peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan kebutuhan SDM. Kendati demikian, dunia perguruan tinggi juga tak bisa sendirian dituntut untuk menyediakan SDM yang berkualitas. Perlu peran serta dan komitmen semua yang ada dalam ekosistem untuk melakukannya. Sebagai lembaga yang mendapatkan amanah pada pengembangan transformasi digital, Wantiknas tentunya memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan transformasi digital di Indonesia termasuk soal talenta digital. Kita siap berkolaborasi dengan semuanya untuk mencari formula terbaik, demi kebaikan bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Jabat Erat

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS



Diterbitkan oleh
Dewan TIK Nasional

Redaksi:
Tim Humas WANTIKNAS

WANTIKNAS

**Dewan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional**

Graha MR 21 Lt. 6
Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telp : 021-39831983

sekretariat@wantiknas.go.id

Daftar isi

02 Dari Menteng Raya

04 Fokus Utama

11 Wawancara

14 Infografis

03 Profil Wantiknas

09 TIK-Talk

13 Opini



Dewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhyono. Dewan yang disebut oleh presiden sebagai kelompok kerja yang dibentuk untuk mendorong pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia ini sesungguhnya bukanlah lembaga yang benar-benar baru.

Jauh sebelumnya, pada 31 Juli 1997, Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Suharto membentuk apa yang disebut Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997 TKTI. Selanjutnya penyempurnaan demi penyempurnaan TKTI dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Namun dengan pertimbangan bahwa Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang telah dibentuk, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah Wantiknas.

Jika sebelumnya TKTI diketuai oleh wakil presiden, menteri kordinator, bahkan menteri negara, namun pada Keppres No. 20 Tahun 2006 disebutkan Wantiknas langsung diketuai oleh Presiden RI dengan Ketua Pelaksana Harian, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika.

Mengacu Keppres No. 20 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, tugas utama Wantiknas adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan TIK. Wantiknas mengemban tugas menyiapkan cetak biru dan *roadmap* TIK Indonesia guna menentukan arah perkembangan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan pada 2025. Target tersebut menuntut pembangunan jaringan komunikasi bagi 43 ribu desa di tanah air yang hingga kini belum memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan

SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat kesehatan masyarakat.

Kemudian lembaga Wantiknas kembali mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1 Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Tugas WANTIKNAS Menurut Keppres No.1 Tahun 2014

- Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi dan konten.
- Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.

Tugas Tambahan WANTIKNAS Menurut KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/04/2020 SELAKU KETUA HARIAN PENGARAH WANTIKNAS.

- Pengembangan Transformasi Digital

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH, ANTARA TANTANGAN DAN CAPAIAN



Transformasi digital adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Pemerintah daerah juga harus melakukannya. Kendati masih ada tantangan yang harus dijawab, terbukti beberapa daerah mampu mewujudkannya.

Dalam keterangan tertulis kepada media pada Sabtu (20/3/2021), Menteri PPN/Kepala Badan PPN Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, percepatan transformasi digital dinilai merupakan langkah penting dalam memacu kegiatan perekonomian. Selain itu juga akan berdampak terhadap perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Mengutip studi yang dilakukan oleh Google, internet ekonomi Indonesia yang berada di angka US\$ 27 miliar di tahun 2018 diperkirakan akan bertumbuh mencapai hingga US\$ 100 miliar di tahun 2025.

Gayung bersambut, beberapa daerah sudah memulai langkah transformasi digital lebih dulu. Paling tidak, tercatat nama Kabupaten Sumedang, DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau dan beberapa daerah lainnya berhasil menerapkan transformasi digital sebagai upaya peningkatan pelayanan di wilayahnya.

Demi Melayani Masyarakat

Popularitas Kabupaten Sumedang tengah meningkat, banyak daerah yang menjadikannya sebagai rujukan dalam urusan transformasi digital. Belakangan sanjungan datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar terkait pengembangan e-SAKIP Desa (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa) karena sinergi dengan program SDGs Desa (*Sustainability Development Goals* Desa). “SAKIP Desa dan SDGs Desa dihadirkan dan digerakkan dengan harapan penggunaan Dana Desa, sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya bisa optimal,” ujarnya.

Begitupula dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyebut Kabupaten Sumedang sebagai wajah terbaik *Digital West Java* yang dicanangkan Pemda Provinsi Jawa Barat demi melihat

layanan yang diberikan lewat *Command Center* yang diresmikan pada Februari 2021 dan memiliki banyak fitur.

Selain kamera pengawas lalu lintas dan keamanan kota (CCTV), berbagai sistem informasi juga terintegrasi seperti aplikasi *e-office*, penilaian pegawai, sistem penanggulangan *stunting*, perizinan, pariwisata, dan lain-lain. *Command Center* Sumedang diklaim lebih baik dari yang telah dimiliki daerah lain.

Sementara Pemda DKI Jakarta telah meluncurkan *Jakarta Smart City* Sejak Desember 2014. *Jakarta Smart City*, mengacu Pergub DKI Jakarta No.306 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola *Jakarta Smart City*. Salah satu aplikasi unggulan dari Pemda DKI adalah JakartaKini atau JAKI.

JAKI memungkinkan penggunaannya dapat mengakses berbagai layanan di Jakarta. Warga Jakarta juga bisa menggunakan JAKI dalam mengakses informasi dan layanan terkait Covid-19, mulai dari kesehatan hingga kesadaran sosial. Dia menjelaskan, JAKI memungkinkan penggunaannya dapat mengakses berbagai layanan di Jakarta. Warga Jakarta juga bisa menggunakan JAKI dalam mengakses informasi dan layanan terkait Covid-19, mulai dari kesehatan hingga kesadaran sosial. Aplikasi ini diproyeksikan menjadi *city super apps* sekaligus *one stop service* untuk warga Ibu Kota.

Memang semangat transformasi digital adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Garuda Sugardo.

“Transformasi Digital di Indonesia ini harus merupakan Gerakan nasional bersama-sama dengan semangat 4.0 melalui penerapan di daerah melalui ASN pertama-tama yaitu gerakan *smart city*. Tujuannya untuk memberikan pelayanan di masyarakat,” tegasnya saat diwawancara.

Kerja Keras, Kerja Cerdas

Kita memahami pasti bukan perkara mudah untuk bisa melaksanakan langkah demi langkah transformasi digital di pemerintahan daerah. Karena selain keterbatasan anggaran, infrastruktur dan pengalaman juga persoalan SDM dan lain sebagainya. Bahkan diakui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, bahwa cita-cita melaksanakan transformasi digital adalah mimpi yang besar, mimpi yang membuat “gemeteran”.

“Berat di awal, karena harus memiliki mimpi



dan ada *goals* terlebih dahulu, dan jika mimpi tersebut tidak membuat kita mengigil dan takut sebenarnya bukan mimpi. Karena mimpi yang benar itu adalah mimpi yang membuat kita takut,” ujarnya saat diwawancarai tim humas Wantiknas.

Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Muhamad Arifin berbagi pengalaman bahwa dalam melaksanakan transformasi digital Pemprov Riau banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kolaborasi telah sering dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang telah tertuang dalam program, kegiatan di beberapa Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dengan menjadikan mereka ABGC sebagai mitra kerja atau pelaksananya,” ujarnya.

Sama dengan Pemprov Riau, Kabupaten Sumedang juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga berhasil menjadi daerah dengan transformasi digital nomor satu di Indonesia.

“Tentu kita banyak melakukan kolaborasi dan berbagi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah lainnya. Justru kita bisa sampai pada posisi saat ini tanpa banyak mengeluarkan biaya karena melakukan kolaborasi,” ujar Herman.

Herman juga mengingatkan bahwa yang terpenting adalah kerja keras sekeras-kerasnya, kerja cerdas, secerdas-cerdasnya kerja ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, kerja cepat, secepat-cepatnya, dengan



Prof. Zainal A. Hasibuan

Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

demikian transformasi digital bisa dilakukan.

Pentingnya Leadership dan SDM

Kolaborasi memang sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan transformasi digital, namun di balik itu ada juga yang menjadi penentu keberhasilan dari transformasi digital di daerah, yakni terkait kepemimpinan atau *leadership* dan SDM yang berkualitas. Menurut Garuda, alasan mengapa Transformasi Digital di Indonesia belum merata karena situasional tergantung kondisi setempat salah satunya dari pimpinan yang berganti.

“Sering kali terjadi seperti itu, sudah dibuat perencanaan yang bagus, konsep yang matang tapi begitu kepemimpinan berganti, programnya ikut berganti. Yang sudah direncanakan tidak lagi jalan. Inilah pentingnya komitmen” papar Garuda.

Bahkan Garuda menilai sejatinya sudah tidak ada lagi tantangan dalam pelaksanaan transformasi digital karena dirinya menilai tantangan saat ini tinggal dari internal pemerintah termasuk Wantiknas di dalamnya.

“Ini tinggal bagaimana kita mendesiminasikan, mensosialisasikan, transformasi digital. Implementasinya sudah mulai tumbuh di kabupaten atau kota, dan faktor pertama tadi sudah saya sampaikan yaitu *government*, karena komando di bupati, walikota, atau gubernur,” tambah Garuda.

Tidak jauh berbeda dengan Garuda, anggota Tim Pelaksana Wantiknas Prof Zainal Arifin Hasibuan juga menyatakan bahwa untuk bisa melakukan transformasi digital diperlukan sebuah proses mulai dari *culture*, *mindset* kemudian *leadership*.

“Ini perlu proses mulai dari *culture* yang harus dirubah dari *culture* non digital menjadi digital. Kemudian *mindset*, dalam hal ini kita akan kewalahan karena sulit untuk diubah. Kemudian ekosistem teknologi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semuanya, ABGC, ekosistem ini perlu kita bangun. Untuk itu dibutuhkan seorang *leader*,” ujarnya.

Zainal percaya dengan tumbuhnya ekosistem, membuat transformasi digital dapat lebih mudah diwujudkan. Bukan tidak ada, menurutnya bisa jadi ada tokoh yang pantas jadi *leader* tapi tidak memiliki kekuasaan atas itu, dengan berkelakar Zainal menyebut bisa juga ada yang dikenal sebagai tokoh tapi tidak mengerti, sementara ada orang biasa justru lebih paham. “Istilahnya yang mengerti tidak berkuasa, yang berkuasa tidak mengerti,” candanya.

Untuk itu menurutnya kita betul-betul membentuk tokoh-tokoh yang mengerti dan ini pasti ada, cuma ekosistemnya tidak terbentuk sehingga tidak muncul, “akhirnya yang muncul dominan politisi,” lanjutnya.

Selain persoalan komitmen pemimpin atau *leadership*, yang juga menjadi sorotan adalah ketersediaan SDM yang mumpuni. Karena transformasi digital hanya bisa sukses apabila didukung oleh SDM yang berkualitas. Data Bank Dunia menunjukkan Indonesia sedang mengalami *digital talent gap* atau kesenjangan talenta digital. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun atau rata-rata 600 ribu talenta digital setiap tahunnya.

Menanggapi hal ini, Zainal menyatakan mencetak 600 ribu talenta digital setiap tahun bukan sesuatu yang tidak mungkin sepanjang proses yang berjalan sudah baik. Menurutnya kita punya masalah pada kapasitas dan kapabilitas yang masih rendah, ditambah dengan *monitoring* yang salah sehingga terjadi proses yang makin jauh, ibaratnya jauh panggang dari api.

Yang harus dilakukan adalah meng-*upgrade* para dosennya terlebih dulu, kemudian unit analisisnya berpindah dari materi ke kompetensi.

“Kita butuh 600 ribu SDM per tahun, ayo kita cetak yang mumpuni yang kita bagi sesuai strata, ada Doktor, Master, Sarjana dan SMK. Bersamaan itu kita sediakan juga lapangan pekerjaannya,” ujarnya.

Zainal juga menambahkan bahwa seharusnya setiap daerah memantapkan diri dengan keunggulan masing-masing. Contohnya Jakarta adalah kota *service*, sementara Bandung adalah kota pariwisata, Medan adalah kota dagang.

“Dari keunggulan lokal tadi akan muncul kebutuhan talenta digital yang berujung munculnya *hardskill* dan *softskill* dari SDM yang ada” tambahnya. Peran perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas SDM juga diakui oleh Garuda, menurutnya Wantiknas tidak bisa jalan sendiri, karena 514 kab/kota itu

tersebar dengan jarak yang jauh satu sama lain.

“Oleh karena itu jadi agak sulit. Kita sebetulnya bisa menggandeng asosiasi pendidikan tinggi. APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer) itu bagus dan bisa diberdayakan. Intinya kerja sama ABGC, pertama *government* mengajak akademi untuk bersama-sama menjawab kebutuhan SDM,” jelasnya.

Dengan melihat keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Sumedang dan beberapa daerah lainnya, kita percaya transformasi digital di daerah bisa diwujudkan sepanjang prosesnya sudah baik dan didukung oleh komitmen dari pemimpin daerah. Kita berharap keberhasilan ini bisa segera diikuti oleh daerah lainnya. ●





Halalbihalal 1442 H Dewan TIK Nasional

Jakarta- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) gelar Halalbihalal 1442 H secara virtual yang dihadiri oleh seluruh jajaran Tim Pelaksana Wantiknas, pada Kamis (20/05).

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham A Habibie mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Wantiknas dengan harapan selama bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

“Alhamdulillah kita telah melalui bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat baik yang sengaja atau tidak, dapat diberikan ampunan Allah SWT dan kita sesama umat juga mohon dapat memaafkan satu sama lainnya. Saya sebagai Ketua Tim Pelaksana Wantiknas dan saya pribadi menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh jajaran Wantiknas mengenai perbuatan saya baik disengaja maupun tidak,” ucap Ilham.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas, Ismail menyampaikan bahwa benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa perang melawan hawa nafsu itu tidak pernah berhenti dan paling besar, serta menganalogikan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah sebuah *milestone* semacam training dari Allah SWT.

“Kita dikasih training sama Allah selama 1 bulan dari 12 bulan untuk melawan hawa nafsu. Hakikatnya kita melakukan ibadah suci Ramadan ini adalah training, semoga 11 bulan ke depan pasca bulan Ramadan kita bisa menunjukkan yang sebenarnya dan dapat dipertemukan kembali dengan training ke depan,” tutur Ismail.

Di akhir kesempatan, seluruh jajaran Tim Pelaksana Wantiknas saling memohon maaf dan berdiskusi ringan penuh *spirit* mengenai transformasi digital dan perencanaan ke depan yang akan dilaksanakan oleh Wantiknas. ●

Literasi Keamanan Digital Untuk Meningkatkan *Security Awareness* dan Sikap Bijak

Persoalan keamanan digital memang tak bisa dianggap remeh, berbagai kerugian telah dialami langsung baik oleh kalangan bisnis, pemerintah, maupun masyarakat. Menurut Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan., S.Si. M.M, masih ada masyarakat yang masih kurang dalam memahami keamanan digital. Padahal literasi keamanan digital penting bagi masyarakat sendiri.

Saat ini soal keamanan data menjadi *issue* yang tengah ramai diperbincangkan. Bagaimana pandangan Anda terkait *issue* ini?

Maraknya peretasan sosial media makin menyadarkan kepada kita semua untuk selalu update dengan perkembangan di ranah siber dan memberi perhatian khusus terhadap keamanan siber. Peretasan di sosial media harus menjadi *trigger* bagi kita agar terus menjalankan budaya keamanan siber, misal membaca syarat dan ketentuan sebelum memasang aplikasi, *update* aplikasi versi terbaru, menerapkan *Two Factor Authentication*, tidak menggunakan wifi publik pada saat membuka aplikasi penting, tidak membuka link yang tidak dikenal (*phising*).

Bocornya keamanan data bisa disebabkan oleh *People, Process, dan Technology*. Mana yang paling berpotensi menjadi penyebab bocornya data?

Dari ketiga unsur *people, process, dan technology*, semua punya peluang sama menjadi penyebab bocornya data. Secara teknis, penyerang akan memanfaatkan celah kerawanan jenis apapun



Anton Setiyawan., S.Si, M.M

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk dilakukan eksploitasi. Oleh karena itu, mitigasi resiko dari unsur-unsur tersebut harus mendapat perhatian yang sama serta penerapan terhadap standar keamanan informasi menjadi fokus dari pemilik sistem.

Bagaimana dengan literasi keamanan digital di masyarakat kita saat ini?

Saat ini kita melihat perlunya peningkatan

kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber menjadi salah satu tantangan tersendiri. Masih ada masyarakat yang masih kurang dalam memahami keamanan digital. Pentingnya literasi keamanan digital di ruang siber bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan *security awareness* dan sikap bijak di ruang siber. Oleh karena itu, BSSN berupaya memberikan literasi keamanan digital melalui media resmi yang dimiliki oleh BSSN dan program-program literasi yang diperuntukkan untuk masyarakat.

Pada tahun 2021 BSSN masih menjadikan literasi keamanan sebagai program prioritas untuk mewujudkan Kecerdasan Digital (*Digital Quotient*) bagi masyarakat. Secara khusus arah literasi keamanan siber mulai spesifik terhadap segmen tertentu seperti segmen anak dan perempuan, segmen lansia, segmen *disabilitas*, dan segmen Pendidikan dasar.

Adakah aturan hukum yang mengatur tentang keamanan data terkait B to B, B to C, dan C to C?

Terkait dengan aturan hukum yang mengatur tentang keamanan data, telah tertuang dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada peraturan tersebut, disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan data dan informasi yang harus memenuhi norma : *confidentiality*, *integrity*, *authentication*, dan *availability*.

Confidentiality adalah bagaimana data tersebut dijaga dan hanya dapat diketahui

oleh pihak yang berwenang. *Integrity* adalah bagaimana memastikan data tersebut tidak diubah. *Authentication* berbicara mengenai keaslian pihak-pihak yang mengakses informasi dan *availability* adalah mengenai ketersediaan data ketika dibutuhkan.

Dalam rangka memperkuat aturan hukum tentang keamanan data, pemerintah mendorong adanya Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (UU KKS) dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dimana penerapan UU KKS adalah untuk menciptakan tata kelola sistem elektronik yang baik serta penerapan UU PDP adalah untuk menjaga keamanan data pribadi.

Terkait dengan ini, apakah perlu sertifikasi sistem keamanan data oleh pemerintah?

Saat ini, standar yang digunakan untuk mengelola risiko terhadap keamanan informasi adalah SNI ISO/IEC 27001, hal ini tertuang dalam Peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Untuk menjalankan standar inilah digunakan skema sertifikasi yang melibatkan industri Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Konsultan yang ada di Indonesia. Dalam rangka persiapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 tersebut, penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) untuk melakukan penilaian terhadap sistemnya. Indeks KAMI adalah sebuah *tools* yang digunakan untuk menilai risiko serta mengidentifikasi kerentanan pada suatu sistem elektronik. Setelah menilai risiko dan mengidentifikasi kerentanan, diharapkan pemilik sistem dapat memperbaiki sistem dan menutup celah keamanan yang ada. ●

Geliat Ekonomi Digital Daerah

Transformasi Digital adalah proses mengubah cara-cara baru untuk bekerja terus menerus dalam organisasi menggunakan kombinasi dan adaptasi teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan layanan/produk, mengoptimalkan sumber, membuat proses lebih baik dan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan. Transformasi digital juga akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum ini, transformasi digital diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga atau empat tahun. Ternyata pandemi Covid-19 membuat transformasi digital menjadi lebih cepat.

Pemerintah mendorong sebanyak mungkin pelaku ekonomi agar siap pindah ke digital. Hal ini dimungkinkan karena kemajuan ekonomi digital di Indonesia cukup menggembirakan. Menurut laporan dari Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia tumbuh 11% selama tahun 2020. Ekonomi digital memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar US\$ 44 miliar atau sekitar Rp. 619 triliun. Menurut laporan SEA eConomy 2020, 1 dari 3 pengguna layanan *online* di Indonesia sepanjang tahun lalu adalah pengguna baru.

Beberapa sektor digital sempat terpuruk pada kuartal kedua 2020, namun dengan cepat tumbuh melesat pada kuartal ketiga, seperti transportasi dan perdagangan, serta jasa keuangan. Sejumlah sektor lainnya justru mendapatkan momentum di saat pandemi, seperti *telemedicine*, pendidikan daring, jasa pengiriman barang, rapat virtual, serta transaksi dan pembayaran digital.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020 menunjukkan bahwa persentase individu yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir secara agregat nasional mengalami kenaikan sebesar 6% dari semula 48,4% pada 2019 menjadi 54,4% pada 2020. Pandemi Covid-19 membuat mayoritas sektor ekonomi tumbuh negatif di Provinsi Banten. Hanya ada beberapa sektor yang dinyatakan tumbuh positif. Dalam hal ini, sektor usaha informasi dan komunikasi serta jasa keuangan masih dapat tumbuh dengan konstan masing-masing sebesar 9,11% dan 2,95% pada kuartal III-2020. Berdasarkan laporan Bank Indonesia pada November 2020, peralihan pelaku UMKM ke jalur usaha *online* masih sangat rendah di Banten. Penggunaan internet dan digitalisasi usaha masih perlu didorong pada UMKM untuk mempromosikan produk/jasa dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian



Hari Sungkari

Anggota Tim Pelaksana WANTIKNAS

Banten secara umum.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berharap, semua desa sudah *go digital*, dengan program Program 500 Desa Digital yang diusung Pemprov. Semua pesantren sudah punya usaha mandiri melalui *platform* digital, reformasi birokrasi juga sudah selesai secara digital, dan mayoritas perdagangan bisa menggunakan *platform*/teknologi digital. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital tersebut, sebenarnya, sejak menjabat Gubernur Jawa Barat pada 2018, Ridwan Kamil telah mencanangkan peta jalan *Digital West Java*. Dia membagi dua agenda, yakni *Smart City* untuk perkotaan dan daerah urban, kemudian *Smart Village* untuk perkampungan dan pedesaan.

Menurut catatan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Barat, termasuk penggunaannya, merupakan salah satu sektor yang tidak terpengaruh oleh Covid-19. Sektor ini malah tumbuh positif, di atas 40%. Jadi, selama pandemi, sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah ekonomi digital, disusul pangan dan lain-lain. Kami juga mendorong penerapan program *QR-code payment* sehingga sekarang sudah menjadi hal normal bagi pelaku UMKM.

Berbeda cara Jawa Tengah, sejumlah upaya guna mendukung perubahan atau transformasi ke arah ekonomi digital, di antaranya membangun infrastruktur IT, menyelenggarakan UMKM virtual expo dan pelatihan bagi UMKM masuk pasar *online* melalui kerja sama dengan perusahaan *e-commerce*, membangun *working space*, membuka akses dukungan permodalan, serta rajin mempromosikan UMKM melalui *platform* digital melalui #LapakGanjar.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut mendorong perbaikan sektor UMKM, khususnya dengan digitalisasi, yakni memberikan bantuan pemasaran produk UMKM melalui aplikasi SiBakul milik Dinas Koperasi dan UMKM DIY serta pembentukan Badan Usaha Milik Kampung yang berorientasi pada pengembangan UMKM dan kampung wisata. pemanfaatan teknologi digital dalam bidang kewirausahaan, naik sekitar 1,5 kali lipat. Kenaikan tersebut didukung oleh penyelenggaraan berbagai pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi digital kepada UMKM, termasuk kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif di Yogyakarta.

Bahkan sektor UMKM menjadi motor utama dalam perekonomian di Jawa Timur (98,9% dari keseluruhan unit usaha). Faktor penentu utama keberhasilan UMKM di Jawa Timur di antaranya ketergabungan dalam kelompok usaha, keterhubungan dengan ecommerce dan pembayaran digital (*Epayment*), juga keterhubungan dengan akses pembiayaan untuk ekspansi usaha.

Lain lagi dengan Pulau Dewata Bali, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kinerja perekonomian Bali lantaran merosotnya kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi ini. Selama pandemi, hanya sektor informasi dan komunikasi yang masih tumbuh positif pada 2020. Hal ini diiringi dengan beralihnya para pekerja ke sektor digital. Permintaan tenaga kerja sektor ini diprediksi meningkat hingga 7%. Pada sisi keuangan, pemerintah Bali juga mengoptimalkan penggunaan *QR-code*, yang diharapkan akan terus mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat inklusi keuangan, serta memajukan UMKM. Dengan dikeluarkannya SE Nomor 3355 Tahun 2020 perihal Protokol Tatanan Kehidupan

Era Baru yang di dalamnya mencakup pembayaran non tunai pada 14 sektor usaha. Sebagian besar desa sudah mendapatkan sinyal 3G dan rasio desa yang sudah mendapatkan sinyal 4G.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya kinerja perekonomian di Kepulauan Riau. Namun angin segar muncul dari Provinsi Kepulauan Riau. Sektor informasi dan komunikasi mampu tumbuh hingga 19% secara tahunan pada kuartal III-2020. Pertumbuhan ini juga merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni pada rentang 10-11%. pertumbuhan ekonomi digital di Kepulauan Riau tidak terlepas dari faktor geografis wilayah tersebut. Faktor jarak yang dekat dengan Singapura membuat Kepulauan Riau, khususnya Batam, menjadi salah satu tujuan investasi dari negara Singapura. Salah satu investasi di sektor ekonomi digital adalah dengan pengembangan *Nongsa Digital Park* dan termasuk meningkatkan kualitas pendidikan TIK, yang didukung oleh *Economic Development Board* untuk mempersiapkan dan mengembangkan banyak talenta digital.

Bapak Presiden Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan Gernas BBI pada 14 Mei 2020. Dari target yang telah ditetapkan, yakni peningkatan sebesar 2 juta unit UMKM/IKM *onboarding* ke *platform* digital, memberikan hasil 70% lebih tinggi, yakni sebesar 3,7 juta. Hingga total unit UMKM/IKM *onboarding* menjadi sekitar 11,7 juta pada akhir 2020. Tujuan BBI hingga 2023 adalah menaikkan jumlah unit Artisan Indonesia (UMKM/IKM) dari 11,7 juta menjadi 30 juta sehingga Target 2021, 2022 dan 2023 adalah peningkatan sebesar 6,1 juta UMKM *onboarding* setiap tahunnya.

Kontribusi ekonomi digital diperkirakan akan mencapai 4,6% pada 2024. Diharapkan juga *merger* antara Tokopedia dan Gojek akan mengakselerasi *rebound* ekonomi Indonesia dengan makin banyaknya produk buatan Indonesia yang diperdagangkan oleh UMKM Indonesia melalui *platform* GOTO. Mari kita dukung transformasi digital dengan lebih banyak belanja produk Indonesia.

Bangga Buatan Indonesia! ●

LANGKAH TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA

Transformasi digital adalah solusi cepat dan strategis yang akan membawa Indonesia menuju masa depan *Digital National*. Semua berlomba untuk melakukan transformasi digital, termasuk pemerintah daerah. Lewat konsep *Smart City*, beberapa daerah sukses melakukan digitalisasi pelayanan terhadap publik. Namun, dibutuhkan SDM yang handal untuk bisa membuat langkah transformasi digital menjadi lebih trengginas.

Indonesia's Digital Pillars



Digital Citizen

Mendorong masyarakat agar berdaya dan mencapai potensi terbaiknya



Digital Economy

Fasilitasi & optimasi aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis teknologi digital



Digital Government

Standardisasi dan integrasi pelayan bagi kesejahteraan masyarakat

Sumber: Kominfo

5 Langkah Percepatan Transformasi Digital

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital, Istana Merdeka, 3 Agustus 2020. Indonesia dapat memanfaatkan masa pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan berbagai terobosan dan percepatan Transformasi Digital di berbagai sektor.

01

Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet

02

Persiapkan roadmap Transformasi Digital di sector-sector strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan public, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran

03

Percepat integrasi pusat data nasional

04

Siapkan kebutuhan SDM talenta digital

05

Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya

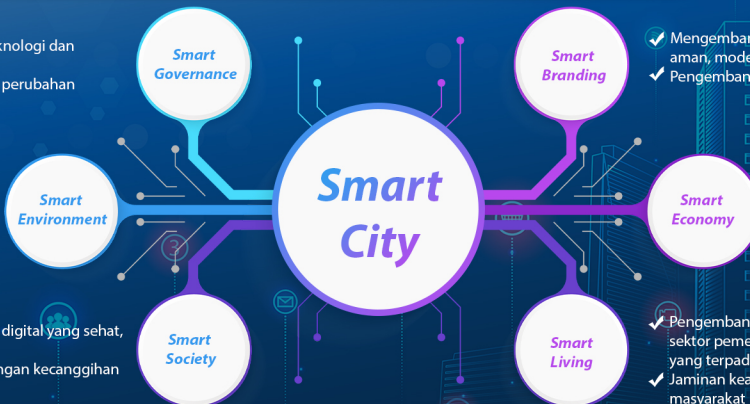
Sumber: Sekretariat Presiden

Cerdas Membangun Kota

- ✓ Ekosistem TIK SPBE
- ✓ Standar proses bisnis, data, teknologi dan keamanan informasi
- ✓ Kapasitas SDM yang tidak anti perubahan

- ✓ Penatakelolaan lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang terkait
- ✓ Pengembangan potensi bencana menjadi sumberdaya produktif (seperti banjir menjadi sumber listrik)
- ✓ Pengendalian lingkungan melalui pemanfaatan TIK

- ✓ Pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif dan produktif
- ✓ Masyarakat yang adaptif dengan kecanggihan teknologi baru



- ✓ Mengembangkan branding kota yang tertib, teratur, aman, modern dan canggih
- ✓ Pengembangan pusat-pusat inovasi

- ✓ Implementasi cashless
- ✓ Interkoneksi sector ekonomi mikro, medium dan makro yang aman melalui teknologi tercanggih secara actual
- ✓ Menjamin kebutuhan masyarakat melalui monitoring kecukupan ekonomi berbasis keluarga

- ✓ Pengembangan wilayah terpadu antara pemukiman, sektor pemerintahan, dunia usaha dan pendidikan yang terpadu
- ✓ Jaminan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK

Sumber: Kominfo



Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Graha MR 21 Lt. 6, Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telp : 021-39831983

sekretariat@wantiknas.go.id